



SOSIALISASI DAN PENGENALAN KONSEP *SMART VILLAGE* DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN

Oleh

Januar Eko Aryansah¹, Raniasa Putra², Dedeng³, Syaifudin Zakir⁴, Syska Purnama Sari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sriwijaya, Palembang

E-mail: ¹januareko@fisip.unsri.ac.id

Article History:

Received: 08-10-2022

Revised: 16-10-2022

Accepted: 17-11-2022

Keywords:

Pendampingan, Smart Village,

Abstract: Pengabdian kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh Kondisi belum dikenalnya konsep Smart Village sebagai Konsep terbaru dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah Desa. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa konsep Smart Village atau Desa cerdas ini merupakan sebuah konsep yang baru dan belum dikenal baik oleh Perangkat Desa Maupun oleh BPD Desa Sungai Pinang, Namun beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh perangkat desa sebenarnya sudah melaksanakan salah satu ciri dari konsep ini. Dengan Pengenalan dan penjelasan konsep Smart Village ini Pemerintah desa Sungai Pinang Mewujudkan konsep tersebut terutama dalam kosep pertama yaitu Smart Governance yang telah diupayakan dengan menyediakan Internet di Kantor Desa serta lebih mengefektifkan medsos Sebagai sarana Komunikasi dan pemberian Informasi Pelayanan kepada Masyarakat. Adapun saran dalam pengabdian ini adalah, Pemerintahan Desa Sungai Pinang dapat menyusun perencanaan dan anggaran tahun berikutnya untuk mendapatkan pembimbingan dan pembinaan terkait Smart Village dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin, kemudian Pemerintah Desa Sunagi Pinang dapat menerapkan beberapa konsep Smart Village yang mudah dan memiliki dukungan sumber daya yang sudah tersedia di desa

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kegiatan tri dharma pendidikan tinggi adalah pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pendampingan, peyuluhan, pembinaan kepada kelompok atau komunitas sebagai sasaran target dari kegiatan pengabdian, dalam pengabdian ini fokus di pemerintrahan desa. Data menunjukkan pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan diperkirakan telah mencapai 54 persen. Jika saat ini penduduk Indonesia sudah lebih dari 240 juta, artinya paling sedikit ada 129,6 juta orang yang memadati perkotaan. Angka ini melambung tinggi dibandingkan hasil sensus penduduk 2010. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk pedesaan



mencapai 119.321.070 jiwa (50,21%) dan penduduk perkotaan mencapai 118.320.256 jiwa (49,79%). Ini berarti banyak penduduk tertarik tinggal di kota atau karena banyak desa sudah berubah menjadi kota.

Hal ini disebabkan karena kota memberikan peluang lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih menjanjikan dari sisi pendapatan dibandingkan dengan desa yang akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan penduduk, sehingga makin banyak orang desa berpindah ke kota. Dengan demikian fokus pembangunan pemerintah yang berusaha membangun dari desa sudah tepat terutama dalam membentuk pemerintahan desa agar lebih inovasi dan mampu menyediakan pilihan-pilihan bagi masyarakatnya salah satunya dengan mengintegrasikan konsep pembangunan tersebut dalam bentuk *Smart Village* yang salah satu maksudnya agar dapat menekan tingkat urbanisasi penduduk desa.

Konsep *smart village* atau Desa Cerdas adalah inisiatif berbasis komunitas yang digagas untuk memanfaatkan teknologi informasi bagi masyarakat pedesaan. Inisiatif ini merupakan upaya untuk mencerahkan dan mengedukasi masyarakat lokal dengan memobilisasi kekuatan kolektif komunitas dari berbagai suku/etnisitas dan profesi untuk mendorong pelaksanaan program pelayanan publik berkualitas yang diintegrasikan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Kehadiran *smart village* diperlukan sebagai upaya untuk mengakselerasi pembangunan desa dengan cara meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan, dan keharmonisan masyarakat lokal.

Inisiatif *smart village* ini penting tidak hanya dari sisi tersedianya regulasi untuk membangun desa menjadi mandiri, tetapi juga mengingat perkembangan digitalisasi saat ini yang berpengaruh besar bagi perkembangan desa, terutama terhadap pola perilaku masyarakat. Salah satu cara untuk mengantisipasi pengaruh tersebut adalah dengan menciptakan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat melalui pembentukan *smart village*. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat mampu membangun desanya dengan mengembangkan desa berbasis teknologi informasi (Herdiana 2019),

Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin terletak di sebelah selatan Kota Palembang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kecamatan Jakabaring Kota Palembang sendiri, sebagai daerah perbatasan dengan Kota, Desa Sungai Pinang dapat dianggap sebagai penyangga perkotaan dengan Jumlah Perumahan Komersil dan Subsidi sekitar 25 perumahan dengan jumlah penduduk lebih kurang 10.000 Jiwa dan beragam profesi pekerjaan membutuhkan pelayanan pemerintahan desa yang memadai agar masyarakat dapat mengakses informasi pelayanan secara menyeluruh berbasis teknologi informasi. Dalam kegiatan pengabdian ini penulis memandang perlu dilakukan kegiatan pendampingan pembentukan *smart village* agar terwujud desa yang mampu mengintegrasikan proses pelayanan dengan warga masyarakatnya serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui *smart village*.

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam pengabdian Pendampingan Pembentukan *Smart Village* di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Upaya Pembentukan *smart village* di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan Bagaimana strategi Pembentukan *smart village* di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.



TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan di desa

Desa memerankan posisi yang strategis sebagai pendukung keberhasilan program pembangunan masyarakat. Menurut Adisasmita pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan (Adisasmita 2006). Dimana prinsip-prinsip pembangunan pedesaan meliputi: transparans, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan yang paling relevan saat ini adalah pembangunan berbasis masyarakat atau komunitas yang memasukan unsur tehnologi informasi di dalam proses pembangunan itu sendiri.(Adisasmita 2006)

Saat ini Konsep pembangunan Pedesaan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar tapi mengarah pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Badri 2016). Gagasan mengenai *smart village* mulai muncul akibat dari pergeseran pandangan desa lama menuju desa baru. Desa lama melihat desa sebagai (1) kampung halaman, (2) wilayah administrasi dan organisasi pemerintahan paling kecil, (3) masyarakat tanpa pemerintah dan pemerintahan. Sementara itu pandangan baru mengenai desa melihat bahwa desa laksana negara kecil yang mempunyai wilayah, kekuasaan, pemerintahan, institusi lokal, penduduk, rakyat, warga, masyarakat, tanah, dan sumberdaya ekonomi. Berdasarkan pandangan baru mengenai desa, maka desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Selanjutnya, untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan kewenangan desa. Adapun SPM yang harus dimiliki desa antara lain: penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan dan pengaduan masyarakat (Permendagri nomor 2 tahun 2017). SPM yang sudah diterapkan suatu desa selanjutnya dapat membawa desa menuju konsep *smart village*. Dengan penggunaan indikator SPM ini akan semakin meningkatkan upaya publik untuk mengetahui haknya dalam mengakses layanan publik dan akhirnya akan menciptakan pemerintahan yang *clean and goog governanace* di Indonesia (Sari and Winarno 2012)

Desa Cerdas (*Smart Village*)

Smart Village merupakan salah satu konsep yang berasal dari *Smart City*. Konsep tersebut merupakan salah satu konsep yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menyelesaikan permasalahan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa (Nursetiawan 2020)

Terdapat enam indikator keberhasilan penerapan smart village sebagai berikut: (1) smart people, yaitu masyarakat pintar terkait kreativitas dan modal sosial; (2) smart economy, yaitu ekonomi pintar berupa inovasi dan persaingan; (3) smart environment, yaitu lingkungan pintar meliputi keberlanjutan dan sumber daya; (4) smart governance, yaitu pemerintahan yang cerdas sebagai agen pengubah, pemberdaya, dan partisipan; (5) smart life, yaitu cerdas hidup berupa kualitas hidup dan kebudayaan; dan (6) smart mobility, yaitu mobilitas pintar dalam hal transportasi dan infrastruktur.

Saat ini pembuatan *smart village* didesa ini akan lebih mudah dilaksanakan dengan



kondisi tingkat digitalisasi masyarakat yang sudah tinggi, dan pelayanan informasi pemerintahan desa sudah menggunakan media sosial dalam berinteraksi dengan masyarakatnya. Tingkat keberhasilan program diukur dengan melihat kinerja pengelolaan sumber daya sehingga menjadi lebih efisien, berkelanjutan dan melibatkan beragam elemen masyarakat. Konsep Smart Village dibutuhkan agar desa-desa mampu mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahan desa (*understanding*), dan dapat mengatur (*controlling*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bentuknya adalah Kunjungan serta penyuluhan terkait konsep dan tahapan pembentukan *Smart Village* dan dilanjutkan dengan pendampingan kepada khalayak sasaran dalam rangka memberikan pemahaman konsep terkait tema pengabdian, dan dilanjutkan dengan mendampingi pemerintahan desa dan masyarakat untuk menginisiasi pembentukan *Smart Village* di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

HASIL

Waktu dan Jumlah Peserta

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan tanggal 20 November 2020, Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Adapun peserta kegiatan yang Sebayak 25 Orang Peserta yang terdiri dari, Perangkat desa, BPD, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Sungai Pinang

Realisasi Pemecahan Masalah

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara dialogis dalam suasana yang akrab dan santai, dengan susunan cara dan jadwal penyampaian materi sebagai berikut:

1. Pembukaan acara dilakuka oleh pembawa Acara
2. Sambutan dari Kepala Desa Sungai Pinang
3. Sambutan dari Ketua Tim Pengabdian Univesritas Sriwijaya
4. Penyerahan Cindramata dan Bantuan Indihome Kepada kepal Desa
5. Penyampaian Materi Pengenalan konsep *Smart Village* kepada Khalayak sasaran oleh Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
6. Penyampaian Materi tentang Pelayanan Publik Di Desa dala mendukung terwujudnya *Smart Village* oleh Dr. Raniasa Putra, S.IP. M.Si
7. Penyampaian Materi tentang Tinjauan Hukum dalam pelaksanaan Smart Village oleh Dedeng, SH., MH

Para peserta pengabdian masyarakat yang terdiri Perangkat desa, BPD, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Sungai Pinang pada awalnya diberikan materi terkait dengan topik pengabdian. Materi Pertama ialah mengenai pengenalan konsep Smart Village dimana dalam manteri tersebut terdapat penjelasan bahwa konsep smart village atau desa cerdas merupakan turunan dari konsep smart city yang terdiri dari 6 indikator berupa, (1) smart people, yaitu masyarakat pintar terkait kreativitas dan modal



sosial; (2) smart economy, yaitu ekonomi pintar berupa inovasi dan persaingan; (3) smart environment, yaitu lingkungan pintar meliputi keberlanjutan dan sumber daya; (4) smart governance, yaitu pemerintahan yang cerdas sebagai agen pengubah, pemberdaya, dan partisipan; (5) smart life, yaitu cerdas hidup berupa kualitas hidup dan kebudayaan; dan (6) smart mobility, yaitu mobilitas pintar dalam hal transportasi dan infrastruktur. Penerapan Konsep ini pada tingkat desa, sehingga indikator dari smart city tersebut dapat diterapkan di tingkat desa yang dalam beberapa contoh penerapannya hanya mengambil empat indikator diantaranya *Smart Governance*, *Smart Living*, *Smart economy*, dan *Smart People*. Keempat indikator ini diterapkan menyesuaikan konteks dan kondisi desa, indikator mana yang lebih diutamakan atau indikator yang diprioritaskan untuk digunakan

Kemudian materi dalam pemaparan dilanjutkan dengan tentang Pelayanan Publik di Desa dalam mendukung terwujudnya *Smart Village*. Pelayanan publik di desa merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah desa, dimana penduduk desa membutuhkan pelayanan yang prima dari para pelayan publik dalam hal ini Kepala desa beserta perangkatnya yang mempunyai tanggung jawab besar agar pelayanan publik di desa dapat membuat masyarakat merasa puas dalam menerima pelayanan dari perangkat desa. Sejalan dengan itu konsep *smart Village* bertujuan agar mempermudah pelayanan di desa dengan salah satu indikatornya yaitu *Smart Governance* yang menekankan dalam pengelolaan pelayanan dan proses pemerintahan menggunakan teknologi informasi dalam proses pelayanan publik di desa, sehingga *smart village* sendiri merupakan wujud nyata dalam rangka mendukung transformasi pelayanan publik dari desa yang dulu secara manual dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dengan memasukan unsur teknologi dan Informasi dalam proses pelayanan dan kegiatan pemerintahan di tingkat desa.

Dalam konteks aturan hukum, pelaksanaan konsep *smart village* apabila kita lihat dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, peraturan tersebut memberikan kewenangan atau otonomi yang lebih kepada desa disertai dengan anggaran yang cukup besar secara langsung ke Pemerintah Desa untuk membuat insiatif program-program yang berupaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu hal yang utama dalam konsep *smart village* ini menekankan bahwa dalam pembentukannya haruslah diutamakan sebagai bentuk inisiasi dari masyarakat dan pemerintah desa untuk membentuk dan melaksanakan indikator-indikator *smart village* yang telah disebutkan diatas. Inisiatif dari semua pihak sangat penting agar dalam pelaksanaannya *smart village* nanti mendapat dukungan dari semua stakeholder masyarakat desa.

Hasil Evaluasi

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ini kepada kelompok sasaran dalam hal ini perangkat desa, BPD, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Sungai Pinang dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab, sehingga akan diketahui tingkat pemahaman dan pengenalan peserta terhadap konsep *smart village* yang disampaikan oleh tim pengabdian dan kemudian tim pengabdian akan memberikan umpan balik dengan memberikan saran dan masukan terkait dengan konsep *smart village* di Desa Sungai Pinang. Dalam kegiatan monitoring ini para peserta atau kelompok sasaran pengabdian sudah mengenai konsep smart village dan ingin segera mewujudkan dalam pengelolaan pemerintah desa Sungai Pinang

KESIMPULAN



Adapun kesimpulan dari pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa konsep *Smart Village* atau Desa cerdas ini merupakan sebuah konsep yang baru dan belum dikenal baik oleh Perangkat Desa maupun oleh BPD dan masyarakat Desa Sungai Pinang, Namun beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh perangkat desa sebenarnya sudah melaksanakan salah satu ciri dari konsep ini. Dengan Pengenalan dan penjelasan konsep *Smart Village* ini Pemerintah desa Sungai Pinang Mewujudkan konsep tersebut terutama dalam kosep pertama yaitu *Smart Governance* yang telah diupayakan dengan menyediakan Internet di Kantor Desa serta lebih mengefektifkan media sosial sebagai sarana Komunikasi dan pemberian Informasi Pelayanan kepada Masyarakat.

Adapun saran dalam pengabdian ini adalah,

1. Pemerintahan Desa Sungai Pinang dapat menyusun perencanaan dan anggaran tahun berikutnya untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan terkait *smart village* dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin
2. Pemerintah Desa Sunagi Pinang dapat menerapkan beberapa indikator dari konsep *smart village* yang mudah dan memiliki dukungan sumber daya yang sudah tersedia di desa

DAFTAR REFERENSI

- [1] Badri, Muhammad. 2016. "Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun)." Jurnal Risalah 27(2): 62–73.
- [2] Herdiana, Dian. 2019. "Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa Di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages)." JURNAL IPTEKKOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi 21(1): 1
- [3] Nursetiawan, Irfan. 2020. "Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Smart Village." Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 7: 112–20.
- [4] Rahardjo Adisasmita. 2006. Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. <https://www.worldcat.org/title/pembangunan-pedesaan-dan-perkotaan/oclc/680447407/editions?referer=di&editionsView=true>.
- [5] Sari, Kusuma Dewi Arum, and Wahyu Agus Winarno. 2012. "Implementasi E-Goverment System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Government Di Indonesia." Jeam XI(1): 1–19.